



PKL Abu Bakar Ali Masih Berjualan

● ERIC ISKANDARS, JAH

Langkah penataan belum dilakukan karena adanya upaya preventif dari PKL.

YOGYAKARTA — Sabtu (30/9) lalu adalah batas akhir para pedagang kaki lima (PKL) di sisi barat Jalan Abu Bakar Ali, Kota Baru, diizinkan berjualan di lokasi tersebut. Namun, berdasar pantauan *Republika* pada Selasa (3/10), seluruh PKL masih beroperasi seperti biasa.

Koordinator PKL Kota Baru, Agung Wibowo mengatakan, dirinya memang belum sepakat dengan rencana pengosongan tersebut. Oleh karena itu, hingga saat ini ia masih melakukan kegiatan operasional seperti biasa. "Hingga saat ini juga belum ada tindakan apapun dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)," ujar Agung kepada *Republika*, Selasa (3/10).

Karena tidak sepakat dengan rencana pengosongan itu ia pun melakukan langkah advokasi bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Surat resmi pun telah dilayangkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhir pekan lalu.

"Namun hingga saat ini belum ada

tanggapan apapun dari pemkot," katanya. Ia bersikeras untuk memperjuangkan nasibnya dan PKL lain di lokasi itu karena ia yakin bahwa tempat usahanya itu tidak melanggar peraturan apapun. Bahkan, lanjutnya, LKBH UII pun juga tidak menemukan peraturan yang menentukan bahwa lokasi itu merupakan lokasi terlarang untuk melakukan kegiatan berjualan.

Ia berharap, jika memang ada rencana pengosongan, seluruh PKL di tempat tersebut diajak untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Selain itu, ia juga berharap dapat dijelaskan secara gamblang mengenai dasar atas pengosongan tersebut. Agung menegaskan, hingga saat ini juga belum ada pihak dari kecamatan atau kelurahan yang mengajakannya berkomunikasi terkait pengosongan tersebut.

"Kami hanya ingin di-*uwongke* (di-perlakukan selayaknya manusia-Red)," ujar dia. Sehingga, persoalan ini dapat diselesaikan dengan jelas dan baik. Termasuk, lanjut dia, jika memang harus dikosongkan, maka diharapkan pemkot juga mempertimbangkan mengenai lokasi relokasi yang memadai, baik dari sisi ketersediaan lahan dan potensi ekonominya.

Agung mengaku, beberapa tahun yang lalu sempat diwajibkan iuran retribusi kepada Pemkot. Namun iuran itu telah lama tidak diberlakukan lagi. Sehingga, beberapa tahun belakangan ini ia hanya membayar retribusi parkir dan biaya kebersihan. Ia juga menekankan

bahwa pemberitahuan pengosongan oleh Satpol PP pun hanya disampaikan secara lisan, tidak melalui surat resmi.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengatakan, hingga saat ini langkah penataan belum dilakukan karena adanya upaya preventif dari PKL. "Tindak lanjutnya masih dilakukan melalui proses musyawarah," ujar Nurwidi kepada *Republika*.

Sehingga, proses itu masih berada di ranah wilayah, dalam hal ini adalah Kecamatan Gondokusuman dan belum berada di ranah Satpol PP. Oleh karena itu, lanjutnya, pihak Kecamatan Gondokusuman akan mengadakan musyawarah dengan para PKL terkait rencana penataan itu.

"Setelah musyawarah itu menghasilkan sebuah kesepakatan, barulah Satpol PP melakukan tindakan," kata dia. Sehingga, saat ini ia belum dapat memastikan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dan kapan tindakan itu akan dilakukan oleh Satpol PP, karena semua tindakan bergantung bagaimana hasil dari musyawarah tersebut.

Ia mengaku hingga saat ini belum berkomunikasi dengan pihak kecamatan terkait informasi terbaru mengenai penataan PKL di Jalan Abu Bakar Ali tersebut. Meski sempat ada imbauan pengosongan akhir pekan lalu, namun ia berkomitmen hanya akan melakukan tindakan setelah musyawarah dari pihak Kecamatan dan PKL memperoleh kesepakatan bersama. ■ ed: fernan rahadi

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman | Netral | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP | | | |

Yogyakarta, 28 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005